

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini berhubungan dengan pengaruh belanja modal dan penyertaan modal daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan seluruh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, periode pengamatan 5 tahun menggunakan data selisih satu tahun antara variabel Pendapatan Asli Daerah (2017-2021) dan belanja modal serta penyertaan modal daerah (2016-2020) dengan total sampel sebanyak 120 sampel, kemudian dilakukan *outlier* menjadi 108 sampel. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Belanja modal meningkatkan tahun anggaran 2016-2020 Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2017-2021 akibat dari pengadaan aset tetap yang dapat dimanfaatkan dan/atau menunjang aktivitas dan pelayanan publik. Belanja modal berdasar pada kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan sarana prasarana. Melalui fasilitas dan sarana prasarana yang memadai akan timbul kepuasan masyarakat dan dapat meningkatkan produktivitas perekonomian, utamanya bagi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepuasan yang dirasakan akibat fasilitas yang memadai, memicu kerelaan masyarakat dalam membayar pajak dan/atau retribusi atas hal yang telah dinikmati.
2. Penyertaan modal daerah tahun anggaran 2016-2020 tidak berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2017-2021. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak melakukan penyertaan modal secara rutin pada tahun anggaran tertentu pada badan usaha atau pihak ketiga yang membantu pemerintah dalam mengelola dan menyediakan sumber daya alam sebagai kebutuhan masyarakat.

Belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dapat digunakan dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah melalui kerelaan masyarakat dalam membayar pajak dan/atau retribusi atas hal yang telah dinikmati. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk mendukung kinerja badan usaha dalam hal ini BUMD atau pihak ketiga yang berperan membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan imbal hasil atas penyertaan modal sebagai pendapatan daerah. Namun dalam praktiknya, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya memaksimalkan penyertaan modal daerah sebagai salah satu sumber pendapatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung tujuan penelitian, yakni menguji pengaruh belanja modal periode tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah periode berikutnya. Namun penyertaan modal daerah periode tertentu tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode berikutnya.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terdapat *missing data* pada variabel penyertaan modal daerah, akibat dari pemerintah daerah yang tidak rutin melakukan penyertaan modal pada tahun anggaran tertentu. Hal ini menyebabkan uji yang dilakukan tidak memenuhi uji normalitas. Oleh karena itu, dilakukan *outlier* untuk mengatasi masalah tersebut.

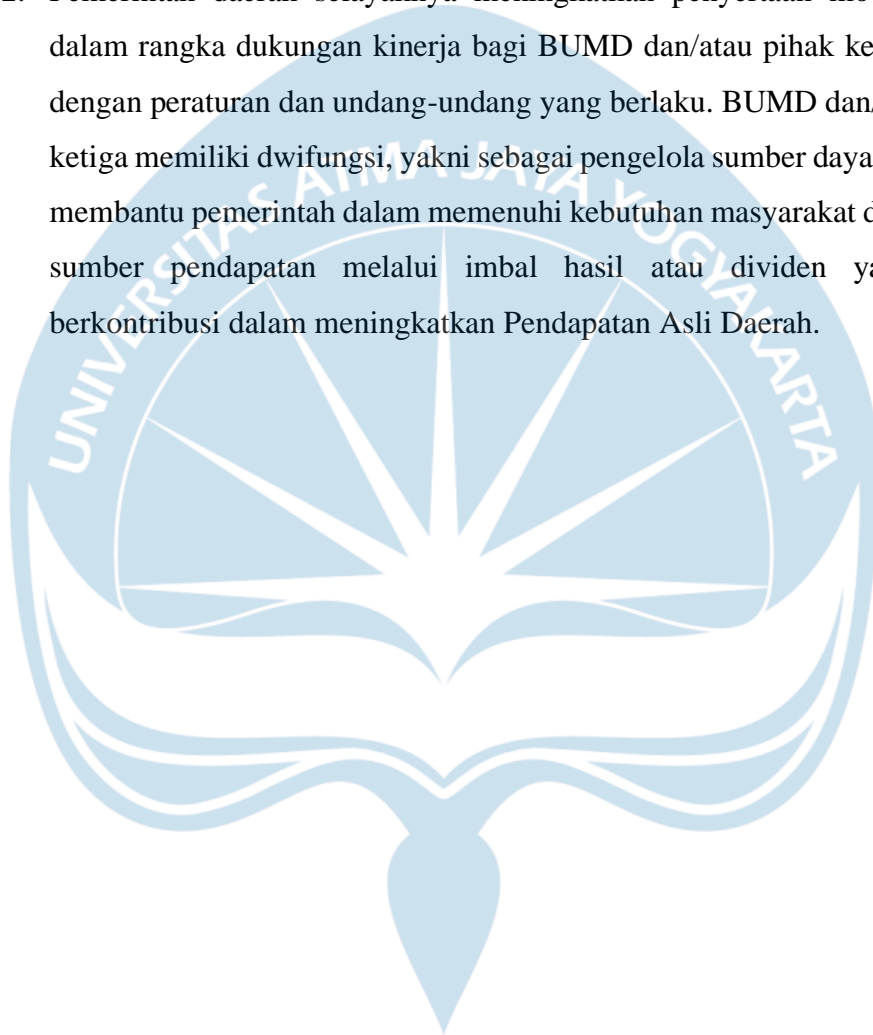
5.3. Saran

Berlandaskan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sepatutnya memprioritaskan belanja modal guna mendukung sektor-sektor potensi daerah, yakni perbaikan, peningkatan atau pemeliharaan infrastruktur,

seperti tempat kegiatan usaha (pasar/pertokoan), jalan dan jembatan serta tempat rekreasi yang dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi sekaligus sebagai sumber retribusi sehingga dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

2. Pemerintah daerah selayaknya meningkatkan penyertaan modal daerah dalam rangka dukungan kinerja bagi BUMD dan/atau pihak ketiga sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. BUMD dan/atau pihak ketiga memiliki dwifungsi, yakni sebagai pengelola sumber daya alam yang membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai sumber pendapatan melalui imbal hasil atau dividen yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliandu, K. (2022, Desember 26). *Kemendagri Dorong Pemda dan BUMD Tingkatkan Inovasi*. Dipetik April 16, 2023, dari investor.id: <https://investor.id/national/317481/kemendagri-dorong-pemda-dan-bumd-tingkatkan-inovasi> diakses 16 apr 2023
- Apriliyanti, D. (2017). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2016-2021). *Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Budi, C. S. (2022, November 13). *Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan, Sektor hingga Komoditas Unggulan*. Dipetik Januari 22, 2023, dari iNewsSulSel.id: <https://sulsel.inews.id/berita/sumber-daya-alam-di-sulawesi-selatan-sektor-hingga-komoditas-unggulan/3>
- Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 No. 2.
- Ekowanti, M. (2017). *Kemitraan dalam Otonomi Daerah*. Malang: Malang: Inteligencia Media.
- Felicia, V. (2020). *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pegawai, Leverage dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Firdausy, C. M. (2014). *Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Perannya terhadap Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azzaa Grafika.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Ketiga ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hartono, J. (2016). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Kesepuluh ed.). Yogyakarta.
- Hastuti, S. D. (2018). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kadafi, M., Dhanny, O., & Wahyuni, D. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Penyertaan Modal Pemerintah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017. *Jurnal Eksis Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda*, 15 No. 1.
- KBBI Daring*. (2016). (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.) Dipetik Januari 20, 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kristianus, A. (2021, May 4). *Kemdagri Minta Pemda Tingkatkan Alokasi Belanja Modal*. Dipetik April 15, 2023, dari Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/769737/kemdagri-minta-pemda-tingkatkan-alokasi-belanja-modal>
- Kurniasari, E. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Intervening*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. (2016-2021). Dipetik Januari 2023, dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan: <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Mardikanto, T. (2014). *CSR: Corporate Social Responsibility, Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mukarromah, Martha, S., & Ilhamsyah. (2015). Perbandingan Imputasi Missing Data menggunakan Metode Mean dan Algoritma K-Means. *Buletin Ilmiah: Matematika, Statistika dan Terapannya*, 4 No. 3, 305-312.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

- Pratama, L. S., Damanik, D., & Mispranoto. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten BatuBara. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3 No. 1.
- Profil Provinsi*. (t.thn.). Dipetik Januari 22, 2023, dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi
- Provinsi Sulsel dengan potensi Wisata Mendunia*. (t.thn.). Dipetik Januari 23, 2023, dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: <https://sulselprov.go.id/welcome/post/provinsi-sulsel-dengan-potensi-wisata-mendunia>
- Putri Marwati, R. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Penyertaan Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Rahmawan, H. (2013). *Analisis Faktor - faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rambe, N. A. (2021). *Pengaruh Belanja Modal Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rusman, M. (2017, Oktober 16). *Potensi Sulsel Yang Mendunia*. Dipetik Januari 22, 2023, dari BisnisSulawesi.com: <https://www.bisnissulawesi.com/potensi-sulsel-yang-mendunia/>
- Setyaningrum, P. (Penyunt.). (2022, September 24). *Daftar Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan*. Dipetik Januari 22, 2023, dari Kompas.com: <https://makassar.kompas.com/read/2022/09/24/204830678/daftar-kabupaten-dan-kota-di-sulawesi-selatan>
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talib, D. (2020). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Destinasi Wisata. *Jurnal Ilmiah Pariwisata (TULIP)*, 3 No. 1.
- Triyanto, H. (2014). *Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat*. Thesis: Universitas Tanjungpura.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

